

# ANALISIS PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

Mega Intan Permata

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

e-mail: [14313148@students.uii.ac.id](mailto:14313148@students.uii.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, sedangkan data untuk data antar waktu (*time series*) diambil pada tahun 2011-2015 dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Data yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program *Eviews 8*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.

***Kata Kunci : PDRB Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Angkatan Kerja, Belanja Daerah.***

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai perekonomian suatu negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian suatu wilayah dalam keadaan baik. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka menggambarkan bahwa perekonomian dalam keadaan yang tidak baik.

Indikator yang paling penting dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah setiap tahun (Boediono, 1999).

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Selain itu, kondisi

perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Selain itu komponen PDRB di suatu daerah juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, jumlah tenaga kerja dan dana alokasi umum.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah otonom dengan jumlah penduduk terbesar ke dua di Pulau Jawa juga sedang mengalami suatu proses pembangunan ekonomi. Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau

Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil hasil pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kabupaten / kota yang berada pada wilayah provinsi tersebut termasuk sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di daerah Jawa Tengah juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana memacu pertumbuhan output daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sebagai daerah otonom dengan kekayaan sumberdaya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia seharusnya Jawa Tengah memiliki nilai PDRB yang jauh lebih tinggi namun pada kenyataannya Jawa Tengah memiliki nilai PDRB yang jauh lebih rendah daripada provinsi provinsi lain di Indonesia seperti pada data PDRB berikut:

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Ribu Rupiah) Tahun 2011-2015**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	23 428.63	24 294.69	25 218.83	26 065.08	25 785.95
Sumatera Utara	28 518.19	31 109.35	34 544.18	37 913.90	41 019.54
Sumatera Barat	24 056.68	26 286.16	28 994.48	32 141.09	34 525.55
Riau	84 811.19	94 996.15	100 691.44	109 784.64	102 789.58
Jambi	32 682.04	35 657.57	39 553.64	43 300.30	45 591.97
Sumatera Selatan	29 830.37	32 830.49	35 810.16	38 584.88	41 341.24
Bengkulu	18 368.80	20 298.91	22 358.05	24 604.40	26 847.20
Lampung	21 981.47	23 910.84	25 768.94	28 755.17	31 195.86
Kep. Bangka Belitung	32 465.38	35 288.32	38 314.56	41 948.37	44 428.55
Kep Riau	72 571.75	80 240.25	87 710.29	94 335.33	101 132.41

DKI Jakarta	125 533.82	138 858.29	155 153.92	174 914.36	195 455.33
Jawa Barat	23 251.17	25 272.29	27 767.25	30 107.21	32 644.96
<b>Jawa Tengah</b>	<b>21 162.83</b>	<b>22 865.43</b>	<b>24 952.13</b>	<b>27 517.84</b>	<b>29 959.34</b>
DI Yogyakarta	20 333.34	21 744.88	23 623.92	25 526.40	27 573.47
Jawa Timur	29 613.05	32 770.38	36 037.18	39 832.68	43 578.10
Banten	27 977.01	30.202.44	32 991.61	36 629.18	40 027.96
Bali	26 433.49	29 443.59	33 135.15	38 099.86	42 659.15
Nusa Tenggara Barat	14 879.83	14 853.74	15 627.57	17 097.66	21 479.40
Nusa Tenggara Timur	10 194.01	11 268.85	12 379.02	13 599.73	14 880.85
Kalimantan Barat	21 548.09	23 427.05	25 561.50	28 062.48	30 629.61
Kalimantan Tengah	28 952.94	31 515.97	34 367.34	36 842.26	40 166.84
Kalimantan Selatan	26 594.38	28 197.08	30 058.02	32 599.83	34 436
Kalimantan Timur	140 229.63	145 998.48	158 472.71	157 399.96	146 992.80
Kalimantan Utara	-	-	88 415.13	95 734.77	96 694.09
Sulawesi Utara	24 867.95	27 373.41	30 121.09	33 800.17	37 842.34
Sulawesi Tengah	22 547.48	25 421.64	28 663.64	31 874.69	37 403.81
Sulawesi Selatan	24 311.67	27 670.91	31 027.93	35 344.88	39 942.99
Sulawesi Tenggara	24 302.10	27 582.58	29 641.12	32 115.83	35 112.85
Gorontalo	16 381.67	18 207.86	20 154.35	22 582.50	25 181.10
Sulawesi Barat	17 001.85	18 688.25	20 457.33	23 415.05	25 751.29
Maluku	13 604.41	15 418.36	17 092.99	19 099.98	20 364.51
Maluku Utara	16 002.57	17 726.06	19 230.01	21 114.23	22 919.86
Papua Barat	56 305.11	58 762.56	63 984.19	68 463.58	72 161.98
Papua	37 111.15	37 935.01	40 153.65	43 134.25	48 010

Sumber: BPS

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Jawa Tengah menempati posisi 25 dari 34 provinsi di Indonesia. PDRB atas dasar harga berlaku paling tinggi ditempati provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya provinsi Kalimantan Timur menempati posisi kedua. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan PDRB terendah.

**Tabel 1.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi  
Tahun 2011- 2015**

<b>Provinsi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
DKI Jakarta	15.64	15.79	16.10	16.50	17.07
Jawa Barat	13.06	13.01	13.11	12.97	13.08
<b>Jawa Tengah</b>	<b>8.85</b>	<b>8.70</b>	<b>8.64</b>	<b>8.64</b>	<b>8.68</b>
DI Yogyakarta	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87
Jawa Timur	14.32	14.40	14.39	14.40	14.53
Banten	3.91	3.90	3.93	4.01	4.11

Sumber : BPS

Berdasarkan data Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki distribusi PDRB yang rendah dibandingkan provinsi DKI Jakarta Jawa Barat dan Jawa Timur. Distribusi PDRB di Jawa Tengah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan di tahun 2011 ke tahun 2012 tahun 2013 ke tahun 2014 tidak mengalami perubahan lalu di tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan.

**Tabel 1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015**

<b>KABUPATEN /KOTA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cilacap	78.936.521,92	77.450.141,10	86.477.559,97	92.025.901,06	98.831.586,98
Banyumas	26.059.371,95	28.486.872,81	31.369.317,74	34.923.374,71	38.798.789,35
Purbalingga	12.205.358,90	13.448.654,21	14.791.295,75	16.630.445,01	18.423.659,76
Banjarnegara	10.589.798,46	11.533.728,14	12.751.207,07	14.342.957,21	15.847.808,40
Kebumen	13.766.060,95	15.126.968,96	16.526.133,05	18.645.422,21	20.762.286,13
Purworejo	9.585.146,26	10.471.685,79	11.462.756,67	12.660.418,96	13.846.863,62
Wonosobo	10.045.107,89	10.899.446,21	11.749.524,22	13.001.090,49	14.150.509,87
Magelang	16.179.965,52	17.738.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16
Boyolali	15.561.176,42	16.987.107,95	18.806.295,97	21.117.415,24	23.550.823,14

Klaten	19.372.039,00	21.348.291,96	23.345.149,84	26.270.890,31	28.988.778,55
Sukoharjo	18.394.170,18	20.248.720,41	22.048.803,61	24.407.488,81	26.711.546,80
Wonogiri	14.506.500,21	16.024.068,09	17.640.990,52	19.668.236,61	21.572.475,62
Karanganyar	18.757.479,22	20.269.679,71	22.219.243,68	24.635.058,52	26.904.049,89
Sragen	18.103.684,11	19.887.564,98	21.870.800,98	24.569.005,63	27.309.123,08
Grobogan	13.886.641,62	15.217.930,31	16.626.336,25	18.181.835,66	20.182.089,20
Blora	11.373.376,27	12.285.562,55	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06
Rembang	9.352.791,37	10.323.373,92	11.441.103,05	12.821.715,64	13.897.816,58
Pati	21.048.733,37	23.360.037,61	25.931.377,59	28.504.861,79	31.224.449,21
Kudus	56.936.183,13	63.448.329,66	70.323.525,77	78.810.084,96	84.617.116,93
Jepara	14.827.688,58	16.381.419,15	18.022.612,49	20.067.294,01	22.071.848,25
Demak	12.900.563,22	14.207.562,06	15.770.997,22	17.381.397,08	19.330.295,28
Semarang	24.440.560,48	27.024.981,68	29.789.069,83	33.160.762,12	36.429.157,58
Temanggung	10.870.286,37	11.841.494,84	13.088.402,25	14.592.453,38	16.107.061,67
Kendal	21.121.513,46	23.112.029,25	25.274.543,43	28.194.358,49	30.908.074,16
Batang	10.719.485,00	11.687.587,71	12.886.461,55	14.408.439,19	15.908.510,08
Pekalongan	11.496.781,11	12.505.866,24	13.757.494,78	15.268.426,26	16.804.659,86
Pemalang	12.497.538,53	13.635.672,54	15.032.617,79	16.751.917,32	18.491.385,49
Tegal	17.194.572,02	18.761.760,13	20.767.110,98	23.108.651,43	25.590.642,44
Brebes	22.903.892,79	24.668.258,21	27.437.547,11	30.899.921,71	34.447.079,42
KotaMagelang	4.464.559,10	4.888.146,47	5.356.942,92	5.926.218,36	6.480.578,87
Kota Surakarta	23.909.011,13	26.425.273,02	29.081.312,47	32.062.446,90	34.982.374,09
Kota Salatiga	6.611.458,40	7.295.224,40	7.990.573,60	8.870.865,65	9.718.060,71
Kota Semarang	91.034.098,92	99.755.672,36	108.807.145,40	122.109.871,16	134.206.715,61
Kota Pekalongan	5.183.065,53	5.741.728,08	6.396.422,00	7.092.776,58	7.778.271,61
Kota Tegal	7.752.829,12	8.371.206,01	9.136.585,52	10.060.187,39	10.984.998,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dari tabel data PDRB diatas pada kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2015 Kota Semarang memiliki PDRB paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan PDRB terendah dimiliki Kota Magelang. Kondisi PDRB di kabupaten dan kota di Jawa Tengah berbeda beda hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Jumlah Angkatan Kerja dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sejumlah peneliti secara umum menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), *Pooled Least Square (PLS)* dan *Generalizes Least Square*. Namun dari ketiga metode tersebut metode Ordinary Least Square paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Afdal tahun 2010 yang meneliti PDRB Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Metode ini sama dengan yang digunakan oleh Widya Kusumaningsih tahun 2012 yang melakukan penelitian PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah Putra tentang PDRB sektor pertanian di Provinsi Aceh juga menggunakan metode OLS. Natalie Karinda tahun 2013 meneliti PDRB Kaliantan Timur menggunakan metode OLS.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti peneliti tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah, Jumlah Angkatan Kerja, Kredit, Belanja Daerah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri, Luas Lahan dan Ekspor berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Peneliti lain seperti Hera Putri Pradipta bersama Dwisetia Poerwono melakukan penelitian dengan metode yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu menggunakan metode *Seemingly Unrelated Regression* yang menunjukkan hasil bahwa variabel Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh terhadap PDRB sedangkan variabel angkatan kerja dan ekspor neto berpengaruh terhadap PDRB. Irawa di tahun 2012 melakukan penelitian PDRB di Kabupaten/ Kota di Yogyakarta dengan menggunakan metode



Generalized Square hasilnya menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap PDRB. Tahun 2013 Eko Wicaksono Pambudi dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* melakukan penelitian di provinsi Jawa Tengah yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel aglomerasi dan *Human Capital Investment* tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel investasi dan angkatan kerja berpengaruh signifikan.

## **LANDASAN TEORI**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno, 2002).

## **PDRB**

### **1. Wilayah Domestik dan Regional**

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

### **2. Produk Domestik**

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.

### **3. Produk Regional**

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengolahan daerah yang sah. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

### **Dana Alokasi Umum**

Menurut Halim (2002 : 160), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

### **Jumlah Angkatan Kerja**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum.

Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas, tergolong tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1996).

### **Belanja Daerah**

Menurut Halim (2002:68) Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Transfer
- e. Belanja Tak Tersangka

## METODE ANALISIS

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 8.

### Model Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

Keterangan :

Y = PDRB menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

$\beta_0$  = koefisien intersep

$\beta_1$  = koefisien pengaruh PAD ( $X_1$ )

$\beta_2$  = koefisien pengaruh Dana Alokasi Umum ( $X_2$ )

$\beta_3$  = koefisien pengaruh Jumlah Angkatan Kerja ( $X_3$ )

$\beta_4$  = koefisien pengaruh Belanja Daerah ( $X_4$ )

i = kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

t = waktu (tahun 2011-2015)

$U_{it}$  = variabel pengganggu

## PEMBAHASAN

Berdasarkan estimasi regresi data panel yang telah dilakukan model estimasi regresi yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect* setelah dilakukan uji Hausman. Hasil koefisien uji determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.785591 yang artinya sebanyak 78,55% variasi atau perubahan pada variabel PDRB dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Angkatan Kerja dan Belanja Daerah sedangkan sisanya sebesar 21,45% dijelaskan

oleh sebab lain di luar model. Berdasarkan Uji Overall (Uji F) nilai F statistic sebesar 13.11318 dengan probabilitas  $0.000000 < \alpha 5\%$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, jumlah angkatan kerja, dan belanja daerah secara bersama sama mempengaruhi PDRB Kabupaten/ Kota. Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar  $6.35E-08$  dengan probabilitas  $0.0033 < \alpha 5\%$  yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien variabel dana alokasi umum adalah sebesar  $6.64E-09$  dengan probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha 5\%$  yang berarti dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien variabel jumlah angkatan kerja adalah sebesar  $4.62E-12$  dengan probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha 5\%$  yang berarti jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien variabel belanja daerah sebesar  $-4.053E-06$  dengan probabilitas  $0.1636 > 5\%$  yang berarti belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel variabel terkait serta analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini bisa terjadi karena kenaikan dan alokasi umum digunakan untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana sehingga akan meningkatkan PDRB. Jumlah

angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini dikarenakan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak memusatkan dana belanja daerah untuk peningkatan pendapatan dan perekonomian daerah , pemerintah daerah lebih memusatkan untuk realisasi belanja hibah dan pos belanja tidak terduga.

Implikasi

## 5.2 Implikasi

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor seperti penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menggali potensi potensi yang ada di daerah serta memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mempermudah pelayanan publik dalam pembayaran pajak daerah sehingga pajak dapat terserap dengan baik.

### 2. Dana Alokasi Umum

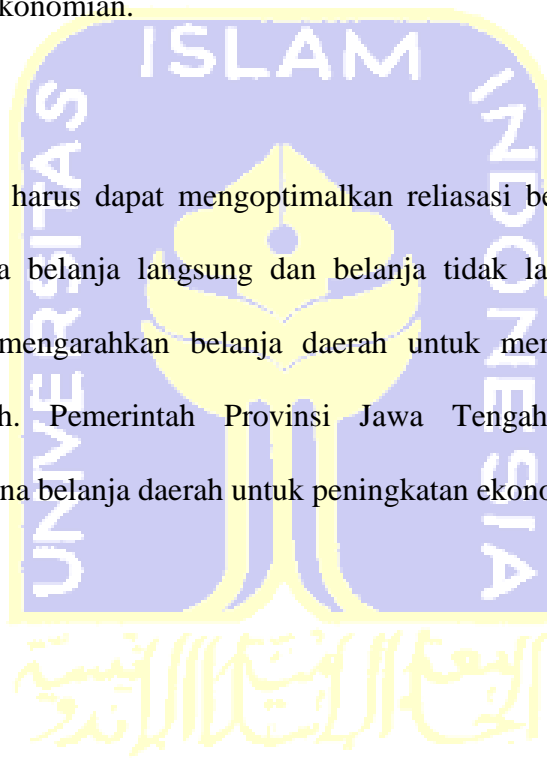
Seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih mengalokasikan Dana Alokasi Umum untuk pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat daerah seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana lokasi pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

### 3. Jumlah Angkatan kerja

Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga angkatan kerja yang ada dapat terserap dengan baik dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan mendirikan balai pelatihan bagi angkatan kerja yang ada di daerah Jawa Tengah sehingga akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

### 4. Belanja Daerah

Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan reliasasi belanja daerah secara proporsional antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pemerintah harus lebih bisa mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seharusnya lebih mengalokasikan dana belanja daerah untuk peningkatan ekonomi daerah.





## DAFTAR PUSTAKA

Afdal .(2010) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.*

Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah dalam Angka 2011-2016*

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota.* Diakses

dari <https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1410>

Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas per Kapita*

*Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi.* Diakses dari

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1628>

Badan Pusat Statistik. *Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa*

*Tengah Tahun Anggaran 2011 – 2013.* Diakses dari

<http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/943>

Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE.

Dumairy.(1996). *Perekonomian Indonesia.* Jakarta:Erlangga

Firmansyah, Fandi (2010) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Faktor-*

*Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Sektor*

*Perdagangan di Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2009*

Halim, Abdul.(2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor

Publik.Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo(2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:

Penerbit ANDI

Karlita, Batari Saraswati dan Yusuf, Edy (2013) melakukan penelitian dengan

judul *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor Terhadap PDRB*

*Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010*

Kusumaningsih, Widya (2012) melakukan penelitian dengan judul *Analisis*

*Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kondisi PDRB Kabupaten/Kota di*

*Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009*

Martikasari, Kurnia (2011) melakukan penelitian dengan judul *Faktor-Faktor*

*yang Mempengaruhi PDRB Provinsi- Provinsi di Pulau Jawa.*

Oates, W, 1993, *Fiscal Decentralization and Economic Development*, *National*

*Tax Journal*, XLVI. 237-243.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum Daerah*

*Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2011-2015*

Pradipta, Hera Putri dan Poerwono, Dwisetia (2013) melakukan penelitian dengan

judul *Faktor Internal dan Faktor Ekternal Produk Domestik Regional*

*Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun1994-2010*

Siahaan ,Bertha P (2010) melakukan penelitian dengan judul *Analisis*

*Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun*

*2004-2008*

Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sukirno. 2002. *Ekonomi Pertumbuhan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI  
dengan Bima Grafika : Jakarta

Sukirno. 2010. *Makroekonomi*. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja  
Grasindo Perseda.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta:  
Erlangga.

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta:  
Ekonisia.

[www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

